

## **ABSTRAK**

### **FUNGSI KONTROL PUBLIK DALAM PELAYANAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

**YUYUN DIAH ANGGRAINI**

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah salah satu program pemerintah dibidang pelayanan administrasi yang berupa pembuatan sertifikat tanah. Pada pelayanan PRONA tahun 2013 dan 2014 di Kabupaten Pringsewu masih ada beberapa masalah yang terjadi diantaranya besarnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengikuti PRONA, lambatnya pemberitahuan informasi mengenai berkas atau syarat-syarat yang dibutuhkan peserta PRONA, dan lamanya pembagian sertifikat. Kurang maksimalnya pelayanan yang diterima masyarakat tersebut membuat diperlukannya kontrol publik untuk mengawasi jalannya pelayanan yang diberikan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan dan peran kontrol publik dalam PRONA.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian ini adalah dari LSM, media massa dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan Proyek Operasi Nasional Agraria dilaksanakan dengan beberapa tahap, dimulai dari penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran dan pemetaan, pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, dan penyerahan sertifikat. Pada tahun 2014 terdapat masalah pengumpulan data yuridis PRONA, karena panitia kurang jelas dalam pemberian informasi mengenai syarat-syarat PRONA sehingga masyarakat yang mengikuti PRONA merasa dipersulit. Selanjutnya, pada tahun 2014 masalah juga terjadi karena waktu yang dibutuhkan dalam pembukuan dan pembagian sertifikat terlalu lama yaitu hampir tiga bulan,

sedangkan seharusnya waktu yang dibutuhkan hanya 30 hari. Peran kontrol publik yang dilakukan terkait masalah-masalah tersebut yaitu adanya pengaduan langsung dari LSM dan POKMAS kepada panitia pelaksana PRONA. Kemudian, pada tahun 2013 kontrol publik juga dilakukan oleh media massa terkait pada besarnya biaya yang diberikan peserta PRONA, media massa melakukan kontrol dengan memuatnya dalam media cetak, supaya aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Sedangkan, LSM dan POKMAS juga membantu dengan menyelenggarakan musyawarah untuk mengklarifikasi mengenai dana tersebut. Pada peran kontrol publik dalam pelaksanaan PRONA tahun 2013 dan 2014 dalam penelitian ini dinilai efektif karena adanya perbaikan pelayanan dimulai dari cepat tanggapnya para panitia BPN serta terjalin komunikasi yang lebih baik antara panitia PRONA dan masyarakat terkait pengadaan PRONA 2016.

Kata kunci: kontrol publik, pelayanan, PRONA